

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1977. *Kamus Inggris Indoensia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Andi. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hartanti, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Internet. Tanggal 30 Mei 2019. <http://kejari.semarangkota.go.id/vimisi>.
- Marpaung, Leden. 2001. *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan.
- Moeljatno. 2008. *KUHP=Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Redaksi GresNews. *Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana*. <http://www.gresnews.com/berita/tips/98958-pelaksanaan-eksekusi-terhadap-terpidana>.
- Redaksi Republika, *Pidana Penjara 16 Tahun dan Denda Rp 1 Miliar Menanti Setnov*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/03/29/p6cjp5330-pidana->
- Redaksi Sinar Grafika. 2010. *KUHAP=Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Diakses dari <https://pih.kemlu.go.id/files/uu-07-2006.pdf>.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40178/uu-no-13-tahun-2006>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diakses dari https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/uu_31_1999.pdf.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diakses dari https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/uu_20_2001.pdf.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Diakses dari https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/UU_46_Tahun_2009.pdf.
- S., C. Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Saleh, K. Wantjik. 1983. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Edisi Kelima*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiadi, Bernadette N. 2015. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: APTIK Jakarta.
- Soerjowinoto, Petrus, dkk., 2014. *Buku Panduan Mahasiswa Metode Penulisan Karya Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi & Teknik Korupsi: Mengetahui untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R. 2012. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.